



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

Liwa, 31 Januari 2025

Kepada Yth.

Nomor : 900/ 63 / IV.01 / 2025
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
(LKjIP) Tahun 2024

Bapak Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setdakab Lampung Barat
Di –
Liwa

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 060/6/09/2025 tanggal 4 Januari 2025 perihal Permintaan Realisasi Rencana Aksi RB Triwulan IV dan Penyusunan LKjIP TA. 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat, (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, terima kasih.

Tang menerima,

NUN NUR'AINI

ms Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

Liwa, 31 Januari 2025

Kepada Yth.

Nomor : 900/ 63 / IV.01 / 2025
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja
(LKjIP) Tahun 2024

Bapak Bupati Lampung Barat
Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setdakab Lampung Barat
Di –
Liwa

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 060/6/09/2025 tanggal 4 Januari 2025 perihal Permintaan Realisasi Rencana Aksi RB Triwulan IV dan Penyusunan LKjIP TA. 2024, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat, (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, terima kasih.

PII. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007

**LAPORAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKAD Kabupaten Lampung Barat telah memiliki dokumen perencanaan jangka menengah sebagai kerangka acuan kerja, yang kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan BKAD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah dalam mengemban tugas dan mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan.

Laporan Kinerja BKAD Kabupaten Lampung Barat ini disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026.

Demikianlah pengantar kami, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, 31 Januari 2025

Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.IP., M.M.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760607 199903 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia, setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat atas penyelenggaraan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2024, yang dapat menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran BKAD Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat terpecah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat. Dengan terbentuknya BKAD Kabupaten

Lampung Barat, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKAD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, sebagai pedoman perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan tugas yang diembannya dan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah, maka BKAD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 memiliki 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) Sasaran Strategis serta 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dan Sasaran tersebut untuk Tahun 2024-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP

BKAD Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Analisis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
Terhadap Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, BKAD Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 dengan baik. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (Renstra), maka terlihat bahwa pada Tahun 2024 target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana ditampilkan pada Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator 1 "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dengan target WTP dapat terealisasi (100%). Kabupaten Lampung Barat dapat mencapai target berupa Opini WTP atas LKPD Tahun 2023 pada Triwulan II 2024. Hal ini berarti indikator ini sudah optimal memenuhi target kinerja, sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya-upaya sebagaimana telah dilakukan selama ini, namun akan terus dilakukan evaluasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung indikator ini, mengingat tantangan untuk terus mempertahankan Opini WTP akan semakin berat, karena aturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis, dan standar penilaian atas LPKD dari Auditor yang semakin sulit.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 merupakan hasil kontribusi, dukungan dan kerja sama berbagai pihak di lingkungan internal BKAD Kabupaten Lampung Barat serta seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi.

Liwa, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.P., M.M.
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 16760607 199903 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Tugas dan Fungsi	I - 2
1.3 Struktur Organisasi	I - 4
1.4 Peran Strategis Perangkat Daerah	I - 4
1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah	I - 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah	II - 1
a. Strategi dan Arah Kebijakan	II - 1
b. Program dan Kegiatan Pembangunan	II - 3
2.2 Indikator Kinerja Utama	II - 3
2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	II - 4
2.4 Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra	II - 8
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	III - 1
3.1 Analisis Sumber Daya Manusia	III - 1
3.2 Analisis Sarana dan Prasarana	III - 2
3.3 Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA. 2023	III - 2
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	IV - 1
4.1 Capaian Kinerja	IV - 1
4.2 Perbandingan Kinerja	IV - 5
a. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	IV - 5
b. Perbandingan Kinerja dengan Pemerintah Tingkat Provinsi ...	IV - 6
c. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis	IV - 7
4.3 Realisasi Anggaran	IV - 10
4.4 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah	IV - 13
BAB V PENUTUP	V - 1
5.1 Simpulan Umum	V - 1
5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan	V - 2
5.3 Permasalahan	V - 3
5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	V - 4
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	II - 2
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	II - 4
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja.....	II - 5
Tabel 2.4. Kerangka Pendanaan	II - 6
Tabel 2.5. Target Kinerja.....	II - 8
Tabel 4.1. Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 86.....	IV - 1
Tabel 4.2. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	IV - 2
Tabel 4.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran.....	IV - 5
Tabel 4.4. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Pemerintah Tingkat Provinsi....	IV - 6
Tabel 4.5. Capaian Sasaran Strategis.....	IV - 7
Tabel 4.6. Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 1.....	IV - 8
Tabel 4.7. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 terhadap Tahun 2023	IV - 8
Tabel 4.8. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 terhadap Target Renstra	IV - 9
Tabel 4.9. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	IV - 12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKAD	I - 4
Gambar 4.1. Peta Sub Proses Bisnis BKAD Sasaran 1.....	IV - 3
Gambar 4.2. Target dan Realisasi IKU.....	IV - 5
Gambar 4.3. Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra	IV - 9
Gambar 4.4. Kebutuhan Pegawai.....	IV - 11
Gambar 4.5. Perbandingan Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran.....	IV - 13
Gambar 4.6. Bupati Lampung Barat Menerima Penghargaan Opini WTP	IV - 14



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak



Pidana Korupsi, dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja serta lebih jauh pencapaian tujuan, sasaran, dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama, terhadap target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan rincian tugas BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Tugas BKAD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



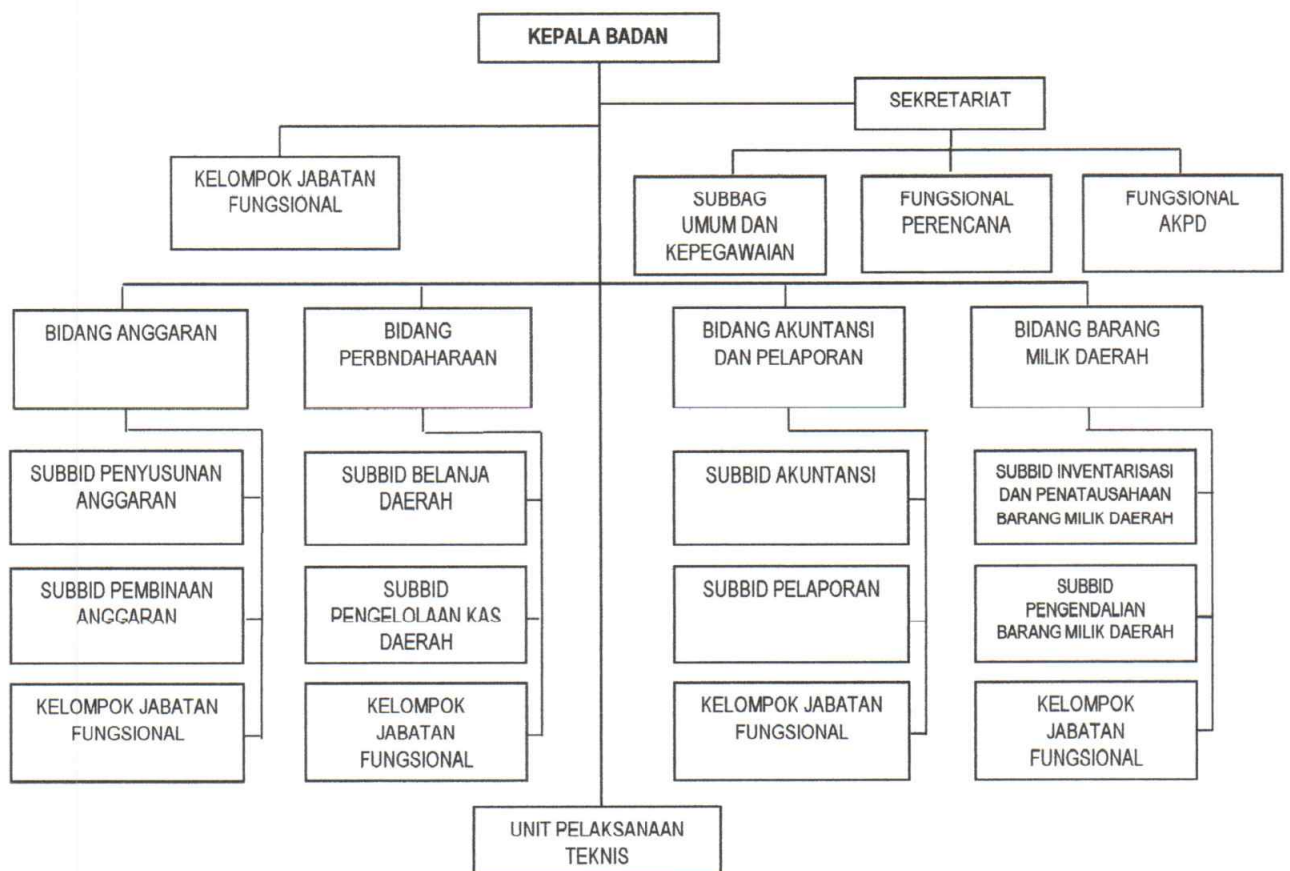
c. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BKAD mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- 2) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang keuangan dan aset daerah;
- 3) Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
- 4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 6) Melaksanakan pengelolaan aset daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah;
- 7) Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- 9) Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Lampung Barat

1.4 Peran Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah, BKAD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Keuangan.

BKAD Kabupaten Lampung Barat memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Tugas tersebut bersifat pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang berkaitan dengan penyusunan APBD dan APBDP, penerbitan SP2D, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK).

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk keempatbelas kalinya secara berturut-turut memperoleh penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Berbasis Akrua, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Penghargaan Opini WTP tersebut telah diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2011.

1.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada isu strategis yang membutuhkan pemecahan.

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.

Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor



BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.

Selain itu, regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini, pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.

Penyebab :

1. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
 2. Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
 3. Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD.
 4. Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD.
- c. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dengan terbentuknya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, setelah sebelumnya terdapat dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14), yang sekaligus menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, termasuk Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan daerah di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diampu oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah "*Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan*".



Selanjutnya, Sasaran daerah yang akan dicapai adalah “*Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan*”.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran daerah di dalam RPD tersebut, Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah “*Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten lampung barat*”.

Selanjutnya, Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah “*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah*”.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran tersebut, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

TUJUAN RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan			
SASARAN RPD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.	1. Melaksanakan penganggaran APBD yang tepat waktu.	1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD.
		2. Melaksanakan manajemen/ pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien.	2. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan kas daerah.
		3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu.	3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
		4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.	4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.



b. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum di dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 10) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 11) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 12) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
 - 14) Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi



Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET			DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	Hasil evaluasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	<p>Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.</p> <p>Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu lembaga/organisasi, yang didasarkan pada 4 kriteria yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2. Kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>). 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. <p>Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.</p> <p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>Unqualified Opinion</i> menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material terkait posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan sistem pengendalian internal yang memadai.</p>

Sumber : Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/03.b/KPTS/IV.01/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026

2.3 Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan



antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan sumber daya yang tersedia, dan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, disusun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan DPA Perubahan dan DPA Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2024, yang berupa perubahan pada pagu anggaran dan target kinerja beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengahnya dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh penerima dan pemberi amanah dengan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2024, Perjanjian Kinerja BKAD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP

Selanjutnya, kerangka pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024, mulai dari Renja Murni, APBD murni, Perubahan Renja, Perubahan APBD, sampai dengan Pergeseran Setelah Perubahan APBD dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.4.
Kerangka Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif					Alasan Perubahan (Dibanding APBD Murni)
		Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Perubahan APBD	Pergeseran Setelah Perubahan APBD	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5 02	KEUANGAN	207.931.862.700	206.213.505.813	206.129.065.813	205.807.008.884	209.708.940.884	Prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah
5 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.527.826.050	22.209.801.606	22.111.661.606	20.773.385.377	20.773.385.377	
5 02 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.785.000	46.650.000	46.650.000	46.650.000	46.650.000	
5 02 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.004.185.000	5.983.682.600	5.983.682.600	4.622.402.883	4.622.402.883	
5 02 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	
5 02 001 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.265.000	24.265.000	24.265.000	24.265.000	24.265.000	
5 02 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.711.000	307.818.000	307.818.000	327.508.000	327.508.000	
5 02 001 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.800.000	151.800.000	160.700.000	152.213.488	152.213.488	
5 02 001 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.608.330.000	15.385.835.956	15.344.645.956	15.357.145.956	15.357.145.956	
5 02 001 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.846.050	304.846.050	238.996.050	238.296.050	238.296.050	



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program dan Kegiatan	Pagu Indikatif					Alasan Perubahan (Dibanding APBD Murni)
		Renja Murni	APBD Murni	Perubahan Renja	Perubahan APBD	Pergeseran Setelah Perubahan APBD	
5 02 002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	182.921.189.000	182.498.672.507	182.512.372.507	183.528.591.807	187.430.523.807	Prioritas daerah dan amanat Peraturan Perundangan terkait penambahan alokasi Dana Desa berdasarkan kinerja Pemerintah Desa
5 02 002 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.027.191.000	2.010.578.900	2.010.578.900	2.066.043.900	2.066.043.900	
5 02 002 2.02	Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	1.007.867.000	655.816.800	655.816.800	661.756.800	661.756.800	
5 02 002 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.559.086.000	1.512.753.000	1.526.453.000	1.512.953.000	1.512.953.000	
5 02 002 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	178.250.000.000	178.242.478.807	178.242.478.807	179.189.313.107	183.091.245.107	
5 02 002 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	77.045.000	77.045.000	77.045.000	98.525.000	98.525.000	
5 02 003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.482.847.650	1.505.031.700	1.505.031.700	1.505.031.700	1.505.031.700	-
5 02 003 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.482.847.650	1.505.031.700	1.505.031.700	1.505.031.700	1.505.031.700	
TOTAL		207.931.862.700	206.213.505.813	206.129.065.813	205.807.008.884	209.708.940.884	

**2.4 Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra**

Target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.5.
Target Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2024	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5	02			KEUANGAN				
5	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	83,50 %	83,50 %
5	02	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen
					Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29 Dokumen	29 Dokumen
5	02	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2024	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
5	02	001	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen
5	02	001	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang
5	02	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2024	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
5	02	001	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	18 Unit	19 Unit
5	02	001	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan
5	02	001	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	75 Unit	62 Unit
5	02	002		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	100 %	100 %
					Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	100 %	100 %
					Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %
5	02	002	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen
					Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen



Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2024	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5	02	002	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu dan akurat	Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu	100 %	100 %
					Persentase penyerapan Dana Transfer	Persentase penyerapan Dana Transfer	100 %	100 %
					Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu dan akurat	Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu	100 %	100 %
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan
					Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dan akurat	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	100 %	100 %
					Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	83 Poin	80 Poin
5	02	002	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	1 Laporan	1 Laporan
					Jumlah Perda Realisasi APBD	Jumlah Perda Realisasi APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	45 Laporan	45 Laporan
5	02	002	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	100 %
5	02	002	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100 %	100 %



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan		Target Kinerja Tahun 2024	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5	02	003		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) tepat waktu dan akurat	100 %	100 %
5	02	003	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	1 Laporan	1 Laporan

Pada tahun 2024, terdapat perubahan pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dari anggaran semula Rp.206.213.505.813,00 pada APBD murni menjadi Rp.205.807.008.884,00 pada Perubahan APBD, atau berkurang sebesar Rp.406.496.929,00 dan menjadi Rp.209.778.940.884,00 pada Pergeseran setelah Perubahan APBD, atau bertambah sebesar Rp.3.565.435.071,00 dari pagu APBD murni. Perubahan pagu anggaran tersebut menyebabkan perubahan target kinerja pada beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, target di APBD murni sebanyak 18 unit, bertambah menjadi 19 unit pada Perubahan APBD.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target di APBD murni sebanyak 34 unit berkurang menjadi 23 unit pada Perubahan APBD, yang disebabkan pecahnya BPKD menjadi 2 perangkat daerah, yaitu BKAD dan Bapenda, sehingga jumlah kendaraan dinas di BKAD berkurang.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target di APBD murni sebanyak 10 unit berkurang menjadi 8 unit pada Perubahan APBD, yang disebabkan pecahnya BPKD menjadi BKAD dan Bapenda, sehingga jumlah gedung kantor di BKAD berkurang.



BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Analisis Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dapat diuraikan ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin
 - 1) Pegawai Laki-laki : 18 orang
 - 2) Pegawai Perempuan : 15 orang
- b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang
 - 1) Pegawai Golongan IV : 4 orang
 - 2) Pegawai Golongan III : 23 orang
 - 3) Pegawai Golongan II : 6 orang
- c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
 - 1) Sarjana Strata 2 (S2) : 9 orang
 - 2) Sarjana Strata 1 (S1) : 17 orang
 - 3) D III : 3 orang
 - 4) SLTA sederajat : 4 orang

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada, secara kuantitatif belum sesuai dengan kebutuhan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat atau belum ideal dalam rangka mendukung pelaksanaan beban pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat. Namun secara kualitatif, sumber daya manusia yang ada cukup mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerjanya, yakni dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tersebut, maka BKAD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.

3.2 Analisis Sarana dan Prasarana

a. Mesin dan peralatan :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Alat berat | : 2 unit |
| 2) Kendaraan roda empat | : 5 unit |
| 3) Kendaraan roda dua | : 18 unit |
| 4) Alat bengkel | : 3 unit |
| 5) Alat ukur | : 2 unit |
| 6) Alat kantor & rumah tangga | : 1.488 buah |
| 7) Alat pertanian | : 1 buah |
| 8) Alat studio dan komunikasi | : 28 unit |

b. Gedung dan bangunan :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) Bangunan gedung | : 647 m ² |
| 2) Bangunan monumen | : 276 buah |

c. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1) Jaringan/instalasi | : 2 unit |
|-----------------------|----------|

d. Aset tetap lainnya :

- | | |
|---------|-----------|
| 1) Buku | : 1 paket |
|---------|-----------|

e. Aset tak berwujud : 21 unit

f. Aset lain-lain : 318 buah

Sarana dan prasarana yang ada, dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset, yakni dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

3.3 Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024

Untuk Tahun Anggaran 2024, disahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6



Tahun 2023. Berdasarkan Perda APBD tersebut, ditetapkan jumlah Belanja BKAD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp.206.213.505.813,00. Dengan disahkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024, pagu Belanja berkurang menjadi sebesar Rp.205.807.008.884,00. Kemudian melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024, terjadi peningkatan pagu Belanja menjadi Rp.209.708.940.884,00.

Jika dibandingkan dengan pagu Belanja pada APBD murni Tahun Anggaran 2023, terjadi penurunan pagu, di mana pagu Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.219.564.302.344,00. Namun jika dibandingkan dengan pagu Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, terjadi peningkatan pagu, di mana pagu Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.205.657.676.561,00. Peningkatan pagu ini sebagian besarnya disebabkan oleh penambahan pagu Dana Desa berdasarkan kinerja Pemerintah Desa sebagai amanat peraturan perundangan.

Penetapan alokasi Belanja Daerah mempertimbangkan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2023, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (PMK 212). Dengan diterbitkannya PMK 212, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalokasikan Belanja Daerah dengan prioritas untuk mendukung bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, penggajian PPPK, dan pendanaan kelurahan.

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum. Dengan ketentuan Bagian Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya, di samping pengalokasian Pendapatan Daerah untuk Belanja Pegawai, maka pengalokasian Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 untuk Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan atau mendukung bidang yang diprioritaskan menjadi terbatas, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.

4.1 Capaian Kinerja

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Skala Predikat Capaian Kinerja Pendekatan Permendagri No. 86 Tahun 2017

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red



Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, hasil reviu, dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, dengan indikator kinerja :
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target WTP setiap tahun.

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100



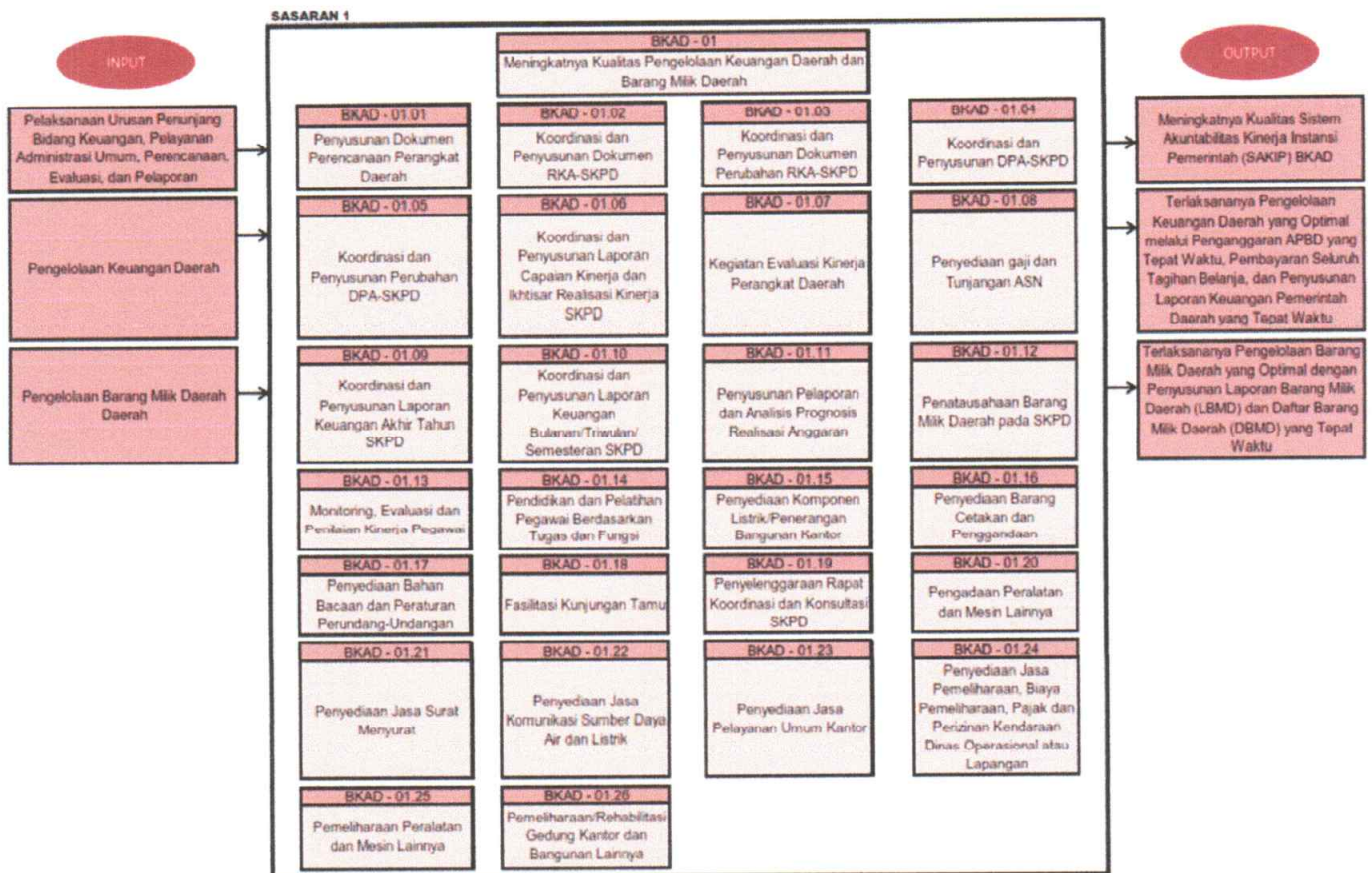
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja 100%. Target kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Predikat Opini WTP. Pada tahun 2024, target Predikat Opini WTP tercapai sesuai yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Peta proses bisnis indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat di bawah ini.

PETA SUB PROSES BISNIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



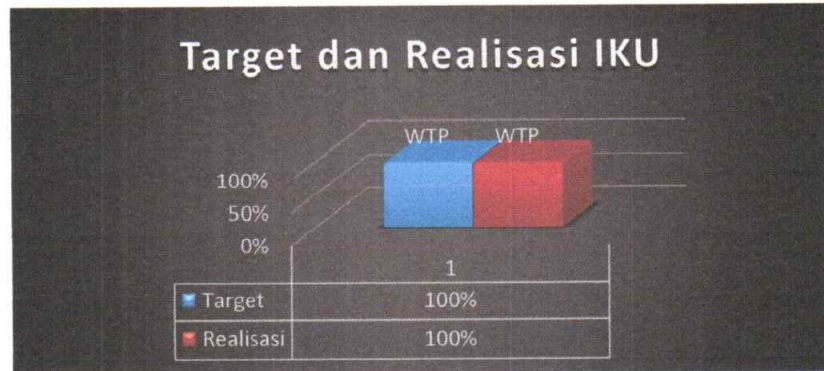


BKAD - 01.27 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BKAD - 01.28 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD - 01.29 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BKAD - 01.30 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
BKAD - 01.31 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BKAD - 01.32 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD - 01.33 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BKAD - 01.34 Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
BKAD - 01.35 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD - 01.36 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD - 01.37 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BKAD - 01.38 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
BKAD - 01.39 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD - 01.40 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BKAD - 01.41 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD - 01.42 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
BKAD - 01.43 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD - 01.44 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD - 01.45 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BKAD - 01.46 Pembinaan Akuntansi, Laporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
BKAD - 01.47 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD - 01.48 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		

BKAD - 01.49 Penyusunan Standar Harga	BKAD - 01.50 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah	BKAD - 01.51 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	BKAD - 01.52 Penatausahaan Barang Milk Daerah
BKAD - 01.53 Inventarisasi Barang Milk Daerah	BKAD - 01.54 Pengamanan Barang Milk Daerah	BKAD - 01.55 Penilaian Barang Milk Daerah	BKAD - 01.56 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah
BKAD - 01.57 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	BKAD - 01.58 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	BKAD - 01.59 Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah	BKAD - 01.60 Pembinaan Pengelolaan Barang Milk Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Gambar 4.1.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.2.

4.2 Perbandingan Kinerja

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya, target yang direncanakan, dan target Renstra.
2. Kinerja nyata dengan target nasional.
3. Kinerja nyata dengan target atau capaian kinerja tingkat Provinsi Lampung.
4. *Benchmarking*, yaitu kinerja nyata dengan perangkat daerah yang sama pada tingkat Provinsi Lampung.

a. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya, Target yang direncanakan, dan Target Renstra

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2024, juga membandingkan capaian tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, serta membandingkan capaian sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir Renstra, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.
Evaluasi Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
								Target	Realisasi			
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100



b. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Perangkat Daerah yang Sama pada Tingkat Provinsi Lampung (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja nyata untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang diraih Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.
Perbandingan Kinerja Nyata dengan Pemerintah Tingkat Provinsi Lampung (*Benchmarking*)

No	Nama Pemerintah Daerah	Predikat Opini BPK atas LKPD Pada Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Provinsi Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Bandar Lampung	WDP	WDP	WDP	WTP PSH dan PHL
3.	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
4.	Kabupaten Lampung Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kabupaten Tulang Bawang	WTP	WTP	WTP	WTP PSH
6.	Kabupaten Pringsewu	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kabupaten Lampung Timur	WTP	WTP	WTP PSH	WTP
8.	Kabupaten Pesawaran	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
9.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
10.	Kabupaten Pesisir Barat	WTP	WTP	WTP PSH	WTP PSH
11.	Kabupaten Lampung Utara	WDP	WDP	WDP	WTP
12.	Kabupaten Tanggamus	WTP	WTP	WDP	WDP
13.	Kabupaten Lampung Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Kabupaten Lampung Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	Kabupaten Mesuji	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kabupaten Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP PSH

Keterangan :

1. WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2. WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
3. WTP PSH : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal
4. WTP PSH dan PHL : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain



c. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5.
Capaian Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
I	Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah				
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan hasil analisis atas pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 sebagai berikut :

I. Penghitungan Indikator Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024

a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Indikator ini dihitung dengan penjelasan/alasan/formulasi/perhitungan :

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan hasil audit terhadap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang meliputi :

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
2. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.
3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran adalah : Opini WTP



Tabel 4.6.
Data Dukung Capaian Indikator Sasaran 1

No.	Data Dukung	Opini BPK
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :	
	- Neraca	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Realisasi Anggaran	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Operasional	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Arus Kas	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Ekuitas	Wajar sesuai SAP
	- Catatan atas Laporan Keuangan	Wajar sesuai SAP
2.	Sistem Pengendalian Intern	Memadai dan relevan
3.	Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai SAP

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian atas seluruh data dukung adalah memperoleh Opini Wajar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga tercapailah target kinerja "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" yaitu WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor : 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 Tanggal 2 Mei 2024.

II. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 Terhadap Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2024 terhadap tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator 1 konsisten mencapai 100 % (dapat mempertahankan



Opini WTP), yang telah diraih sejak tahun 2011 hingga tahun 2024 secara berturut-turut.

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Capaian Kinerja Sasaran s.d. Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian s.d. Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat Opini	WTP	WTP	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2024 dengan target akhir Renstra sebagai berikut :

a. Indikator "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Tahun 2023 adalah tahun ke-1 Renstra, capaian kinerja indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 adalah 100%, di mana target Predikat Opini WTP tercapai. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran tahun 2024 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.3.



4.3 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin sebanyak 3 program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 14 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 60 Sub Kegiatan. Alokasi dana tahun 2024 berdasarkan Perubahan APBD untuk Belanja sebesar Rp.209.708.940.884,00 terealisasi sampai dengan triwulan IV/akhir tahun anggaran sebesar Rp.203.680.981.081,00 atau 97,13%.

Dari realisasi anggaran tersebut, realisasi anggaran terbesar adalah realisasi Belanja Transfer, yaitu sebesar Rp.176.408.899.600,00, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Pekon berupa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Pekon berupa Belanja Alokasi Dana Pekon dan Dana Desa.

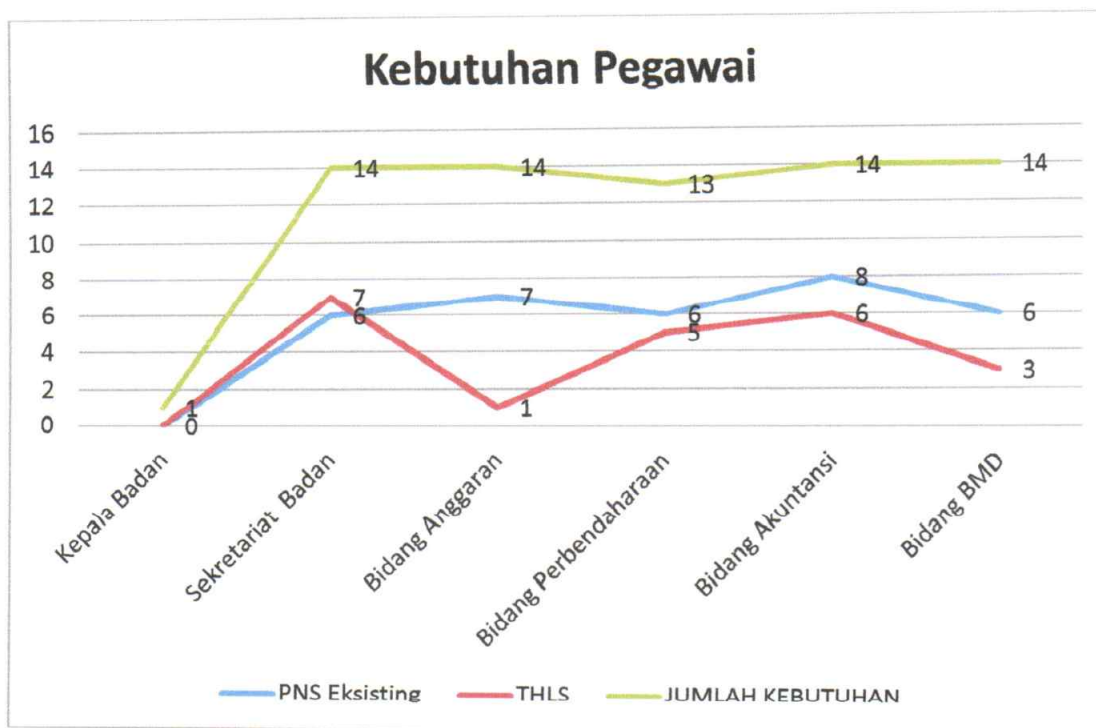
Sisa anggaran yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.6.027.959.803,00. Anggaran yang tidak terserap tersebut terbesar adalah berupa Belanja Operasi sebesar Rp.5.135.987.909,00. Selain itu, anggaran yang tidak terserap lainnya berupa Belanja Transfer sebesar Rp.677.670.800,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.189.543.643,00, dan Belanja Modal sebesar Rp.24.757.451,00.

Tidak terserapnya anggaran Belanja antara lain disebabkan oleh :

1. Tidak terbayarnya anggaran untuk penambahan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai, berupa Tunjangan Kinerja, karena kebijakan pimpinan walaupun Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Tambahan Penghasilan Pegawai telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri, yang memuat besaran kenaikan Tunjangan Kinerja bagi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Tidak terserapnya anggaran iuran Jaminan Kesehatan, iuran JKK dan JKM ASN, dan iuran JKK dan JKM Non ASN, di mana realisasi berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

3. Tidak terserapnya anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Rertibusi Daerah, di mana penyerapan anggaran sesuai dengan realisasi Pajak dan Retribusi Daerah hingga Triwulan III tahun 2024, sehingga realisasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Triwulan IV tahun 2024 belum bisa direalisasikan Dana Bagi Hasilnya.
4. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga, di mana penganggaran belanja ini adalah dalam rangka ketersediaan dana untuk kejadian darurat.

Selanjutnya, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024, didukung oleh berbagai faktor, di antaranya sumber daya aparatur. Keberhasilan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Gambar 4.4.

Berdasarkan Gambar 4.6. di atas, terlihat bahwa kinerja 70 pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat ditangani oleh 33 pegawai ditambah dengan 22 THLS sesuai kondisi yang ada. THLS yang ada merupakan Tenaga kontrak tipe B yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional



sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah membiayai kegiatannya dengan anggaran sebesar Rp.209.708.940.884,00, untuk mencapai kinerjanya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar Rp.203.680.981.081,00 atau 97,13% dari anggaran yang direncanakan dan telah mewujudkan sebagian target kinerjanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam mencapai kinerja sarannya, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki, berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta anggaran.

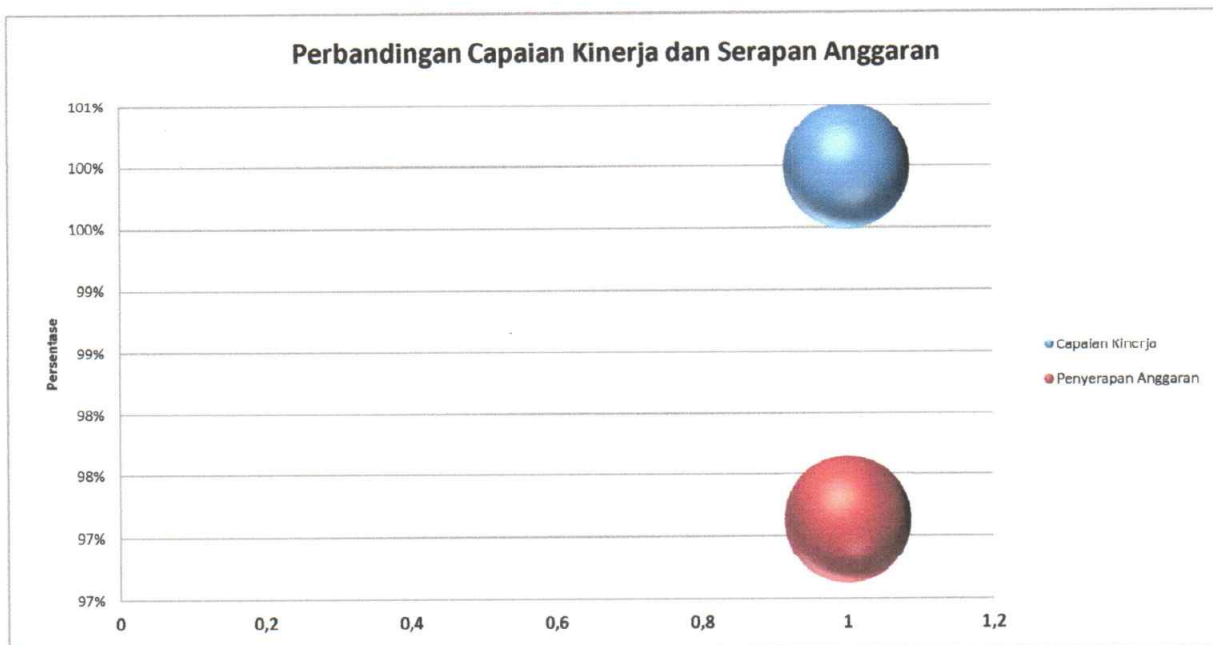
Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.9.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	97,13%	2,87%
Jumlah Total Efisiensi					2,87%
Rata-rata Efisiensi per Indikator					2,87%

Berdasarkan tabel di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan capaian yang cukup baik, di mana pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencapai target. Selanjutnya, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, efisiensi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 2,87%.

Sebagai gambaran lebih jelas, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 4.5.

4.4 Inovasi dan Prestasi yang Diraih Perangkat Daerah

Pencapaian indikator kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sesuai target dapat terwujud karena didukung oleh beberapa inovasi yang dilakukan, yaitu :

1. Aplikasi SIPD terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), yang terdiri dari sistem perencanaan (e-SSH, e-RPJMD, e-Renstra, e-Musrenbang, e-RKPD) dan sistem keuangan (e-Budgeting).

2. Aset Online.

Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Aset Online dapat diakses dengan menginstal aplikasi "QR & Barcode" pada Playstore.



BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Pencapaian kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, dengan indikator kinerja :
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, realisasi kinerja tahun ini adalah Opini WTP dari target Opini WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Pada Tahun 2024, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.209.708.940.884,00 (berdasarkan Perubahan APBD), dan pada akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.203.680.981.081,00 atau mencapai



97,13%. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adalah SILPA Rp.6.027.959.803,00.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait, baik *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Pencapaian indikator sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang sesuai target dapat terwujud karena didukung oleh beberapa hal, yaitu :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 14 tahun berturut-turut meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dinilai wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran berbasis kinerja.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi, di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total Pendapatan Daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.



3. Adanya Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki aplikasi yang terintegrasi, yaitu Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), yang terdiri dari sistem perencanaan (e-SSH, e-RPJMD, e-Renstra, e-Musrenbang, e-RKPD) dan sistem keuangan (e-Budgeting).

5.3 Permasalahan

Dalam pencapaian indikator sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target kinerja, antara lain :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang dinamis.

Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Akan tetapi dengan pencapaian tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan Opini WTP, karena Auditor BPK dan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik) terus meningkatkan standar penilaian.

Selain itu, regulasi di bidang pengelolaan keuangan sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan APBD yang telah berjalan.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal, yang disebabkan oleh :
 - a. Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
 - b. Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
 - c. Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD.
 - d. Regulasi di bidang pengelolaan aset sangat dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya, misalnya di dalam penyusunan Standar Satuan Harga yang mempengaruhi penyusunan APBD.



3. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.

5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sehubungan dengan permasalahan yang masih dan dapat ditemui dalam pencapaian kinerja, rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan agar ke depannya dapat mencapai dan mempertahankan capaian target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang ada melalui pemahaman peraturan perundang-undangan maupun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal.
4. Meningkatkan koordinasi dan menciptakan sinergi baik di internal BKAD, dengan seluruh OPD, maupun dengan seluruh stakeholders.

Kabupaten Lampung Barat, 31 Januari 2025

Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



SUMADI, S.IP., M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760607 199903 1 007

LAMPIRAN

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah										
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.650.000.00	3.527.500.00	7.56	18.970.000.00	40.66	25.322.500.00	54.28	42.926.175.00	92.02
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.405.000.00	315.000.00	3.03	1.420.000.00	13.65	1.535.000.00	14.75	7.242.450.00	69.61
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.245.000.00	0.00	0	1.875.000.00	44.17	1.995.000.00	47	4.245.000.00	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.120.000.00	240.000.00	5.83	1.995.000.00	48.42	4.120.000.00	100	4.120.000.00	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.120.000.00	610.000.00	14.81	4.120.000.00	100	4.120.000.00	100	4.120.000.00	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.120.000.00	0.00	0	1.995.000.00	48.42	1.995.000.00	48.42	4.120.000.00	100
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.895.000.00	2.242.500.00	16.14	6.980.000.00	50.23	10.202.500.00	73.43	13.895.000.00	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.745.000.00	120.000.00	2.09	585.000.00	10.18	1.355.000.00	23.59	5.183.725.00	90.23
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.622.402.883.00	802.313.779.00	17.36	2.006.710.712.00	43.41	2.794.556.464.00	60.46	3.641.627.428.00	78.78
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.618.217.883.00	802.313.779.00	17.37	2.006.710.712.00	43.45	2.792.496.164.00	60.47	3.637.442.428.00	78.76
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.445.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.445.000.00	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.295.000.00	0.00	0	0.00	0	615.000.00	47.49	1.295.000.00	100
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.445.000.00	0.00	0	0.00	0	1.445.000.00	100	1.445.000.00	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.904.000.00	0.00	0	2.377.000.00	48.47	3.754.000.00	76.55	3.754.000.00	76.55
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.904.000.00	0.00	0	2.377.000.00	48.47	3.754.000.00	76.55	3.754.000.00	76.55
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.265.000.00	0.00	0	0.00	0	2.625.000.00	10.82	23.396.350.00	96.42
1.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.265.000.00	0.00	0	0.00	0	2.625.000.00	28.33	8.396.350.00	90.62
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	15.000.000.00	100
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.508.000.00	75.579.409.00	23.08	162.699.976.00	49.68	231.393.526.00	70.65	319.450.165.00	97.54

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.983.000.00	5.983.000.00	100	5.983.000.00	100	5.983.000.00	100	5.983.000.00	100
1.5.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	121.370.000.00	29.500.000.00	24.31	55.090.000.00	45.39	84.590.000.00	69.7	121.370.000.00	100
1.5.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000.00	660.000.00	16.67	1.980.000.00	50	2.790.000.00	70.45	3.960.000.00	100
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Taru	4.131.000.00	1.021.500.00	24.73	2.043.000.00	49.46	3.064.500.00	74.18	4.131.000.00	100
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKFD	192.064.000.00	38.414.909.00	20	97.603.976.00	50.82	134.966.126.00	70.27	184.006.165.00	95.8
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.213.488.00	45.000.000.00	29.56	45.000.000.00	29.56	45.000.000.00	29.56	127.455.037.00	83.74
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.213.488.00	45.000.000.00	29.56	45.000.000.00	29.56	45.000.000.00	29.56	127.455.037.00	83.74
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.357.145.956.00	2.777.173.126.00	18.08	5.805.574.890.00	37.8	8.942.972.919.00	58.23	13.215.607.406.00	86.06
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.940.000.00	1.000.000.00	20.24	2.000.000.00	40.49	3.000.000.00	60.73	4.876.000.00	98.7
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.040.000.00	17.239.182.00	24.97	29.269.023.00	42.39	40.758.710.00	59.04	54.190.700.00	78.49
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor	15.283.165.956.00	2.758.933.944.00	18.05	5.774.305.867.00	37.78	8.899.214.209.00	58.23	13.156.540.706.00	86.09
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.296.050.00	49.303.250.00	20.69	120.162.230.00	50.43	169.602.540.00	71.17	223.433.294.00	93.76
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.800.000.00	43.989.500.00	29.37	67.897.430.00	45.33	96.332.570.00	64.31	137.103.324.00	91.52
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.810.000.00	2.960.000.00	11.93	10.935.000.00	44.07	16.790.000.00	67.67	24.810.000.00	100
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.686.050.00	2.353.750.00	3.7	41.329.800.00	64.9	56.479.970.00	88.68	61.519.970.00	96.6
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.066.043.900.00	0.00	0	263.974.500.00	12.78	689.681.474.00	33.38	1.718.593.820.00	83.18
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.425.400.00	0.00	0	1.861.000.00	1.09	41.683.000.00	24.46	161.847.000.00	94.97
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	113.354.000.00	0.00	0	10.534.500.00	9.29	102.000.500.00	89.98	102.000.500.00	89.98
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	807.470.000.00	0.00	0	243.078.500.00	30.1	252.564.671.00	31.28	685.568.917.00	84.9
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	909.842.500.00	0.00	0	8.500.500.00	0.93	292.185.303.00	32.11	717.385.403.00	78.85
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	64.952.000.00	0.00	0	0.00	0	1.248.000.00	1.92	51.842.000.00	79.82
2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Pertendahan Daerah	661.756.800.00	43.009.966.00	6.5	242.208.766.00	36.6	402.370.006.00	60.8	635.262.016.00	96
2.2.1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	23.000.000.00	0.00	0	10.956.000.00	47.63	17.639.000.00	76.69	23.000.000.00	100
2.2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	64.452.000.00	9.485.060.00	14.72	27.617.510.00	42.85	35.642.960.00	55.3	58.055.460.00	90.08
2.2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	306.258.800.00	18.626.906.00	6.08	121.607.306.00	39.71	214.900.706.00	70.17	303.102.904.00	98.97
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	79.825.000.00	14.898.000.00	18.66	24.694.400.00	30.94	62.825.700.00	78.7	70.291.800.00	88.06
2.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	163.161.000.00	0.00	0	56.661.050.00	34.73	70.689.140.00	43.32	156.093.052.00	95.67
2.2.6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.060.000.00	0.00	0	672.500.00	2.68	672.500.00	2.68	24.718.800.00	98.64

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.512.953.000.00	83.599.700.00	5.53	507.109.353.00	33.52	792.743.553.00	52.4	1.277.837.319.00	84.46
2.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36.231.000.00	2.146.500.00	5.92	8.413.500.00	23.22	16.590.500.00	45.79	31.091.000.00	85.81
2.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	123.838.000.00	0.00	0	25.193.000.00	20.34	39.088.000.00	31.56	83.637.500.00	67.54
2.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	108.736.000.00	4.297.600.00	3.95	19.736.400.00	18.15	36.937.600.00	33.97	74.272.700.00	68.31
2.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, ELUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	386.029.000.00	57.093.600.00	14.79	158.816.600.00	41.14	165.796.600.00	42.95	289.343.856.00	74.95
2.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	553.960.000.00	16.862.000.00	3.04	275.675.853.00	49.76	504.579.853.00	91.09	509.917.303.00	92.05
2.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40.201.000.00	3.200.000.00	7.96	10.567.000.00	26.29	13.567.000.00	33.75	37.698.125.00	93.77
2.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Ferbenaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	171.478.000.00	0.00	0	0.00	0	2.971.000.00	1.73	164.636.835.00	96.01
2.3.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	27.808.000.00	0.00	0	8.707.000.00	31.31	13.213.000.00	47.52	23.301.000.00	83.79
2.3.9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	64.672.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	63.939.000.00	98.87
2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	183.091.245.107.00	91.5333.469.00	0.5	78.192.570.654.00	42.71	126.105.771.423.00	68.88	180.974.134.196.00	98.84
2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	183.091.245.107.00	91.5333.469.00	0.5	78.192.570.654.00	42.71	126.105.771.423.00	68.88	180.974.134.196.00	98.84
2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	98.525.000.00	20.977.245.00	21.29	23.283.245.00	23.63	34.993.245.00	35.52	68.014.095.00	69.03
2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	98.525.000.00	20.977.245.00	21.29	23.283.245.00	23.63	34.993.245.00	35.52	68.014.095.00	69.03
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.505.031.700.00	236.954.700.00	15.74	574.325.850.00	38.16	901.084.175.00	59.87	1.409.488.780.00	93.65
3.1.1	Penyusunan Standar Harga	126.042.500.00	0.00	0	11.602.000.00	9.2	56.651.750.00	44.95	124.920.150.00	99.11
3.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	234.064.800.00	9.730.000.00	4.16	22.107.800.00	9.45	148.407.800.00	63.4	233.941.126.00	99.95
3.1.3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.000.000.00	5.079.000.00	7.7	21.101.600.00	31.97	36.796.825.00	55.75	43.911.500.00	66.53
3.1.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	139.449.000.00	15.106.200.00	10.83	31.226.200.00	22.39	31.226.200.00	22.39	138.491.550.00	99.31
3.1.5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	156.752.000.00	36.392.500.00	23.22	128.604.500.00	82.04	139.941.950.00	89.28	156.156.950.00	99.62
3.1.6	Pengamanan Barang Milik Daerah	148.537.400.00	48.860.000.00	32.89	117.281.000.00	78.96	133.922.000.00	90.16	142.606.700.00	96.01
3.1.7	Penilaian Barang Milik Daerah	158.170.000.00	16.143.000.00	10.21	22.507.000.00	14.23	74.951.500.00	47.39	141.514.304.00	89.47
3.1.8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.020.000.00	0.00	0	14.940.000.00	51.48	20.277.450.00	69.87	24.302.450.00	83.74
3.1.9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	159.051.000.00	68.172.000.00	42.86	77.245.000.00	48.57	112.810.850.00	70.93	133.650.300.00	84.03
3.1.10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	163.326.000.00	9.730.000.00	5.96	58.332.750.00	35.72	76.719.850.00	46.97	158.966.400.00	97.33

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2024	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.1.11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	48.265.000.00	10.535.000.00	21.83	31.786.000.00	65.86	31.786.000.00	65.86	48.265.000.00	100
	3.1.12 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	76.354.000.00	17.207.000.00	22.54	37.592.000.00	49.23	37.592.000.00	49.23	62.762.350.00	82.2
	Total Per Sasaran	209.798.940.884.00	5.052.772.144.00	2.41	87.964.967.176.00	41.95	141.141.870.925.00	67.30	203.680.981.081.00	97.13
	Grand Total	209.798.940.884.00	5.052.772.144.00	2.41	87.964.967.176.00	41.95	141.141.870.925.00	67.30	203.680.981.081.00	97.13

**EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)			Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)					Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah BKAD	100%	100%	100%	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	83,50 %	84,60 %	101,32%	20.773.385.377	17.597.650.855	84,71%
1		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 100% - 100% - 100%	46.650.000	42.926.175	92,02%
1)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	10.405.000	7.242.450	69,61%
2)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4.245.000	4.245.000	100%
3)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4.120.000	4.120.000	100%
4)		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.120.000	4.120.000	100%
5)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4.120.000	4.120.000	100%
6)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	13.895.000	13.895.000	100%
7)		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	17 Laporan	100%	5.745.000	5.183.725	90,23%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
2		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 40 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 40 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 100% - 100% - 100% - 100%	4.622.402.883	3.641.627.428	78,78%
8)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	100%	4.618.217.883	3.637.442.428	78,76%
9)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1.445.000	1.445.000	100%
10)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	1.295.000	1.295.000	100%
11)		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1.445.000	1.445.000	100%
3		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	100%	100%	100%	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	4.904.000	3.754.000	77%
12)		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	19 Laporan	100%	4.904.000	3.754.000	77%
4		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 3 Orang	- 1 Dokumen - 3 Orang	- 100% - 100%	24.265.000	23.396.350	96,42%
13)		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	9.265.000	8.396.350	90,62%
14)		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	100,00%	15.000.000	15.000.000	100,00%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 100% - 100% - 100% - 100%	327.508.000	319.450.165	97,54%
15)		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	5.983.000	5.983.000	100%
16)		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	121.370.000	121.370.000	100%
17)		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3.960.000	3.960.000	100%
18)		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4.131.000	4.131.000	100%
19)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	192.064.000	184.006.165	95,80%
6		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	19 Unit	19 Unit	100%	152.213.488	127.456.037	84%
20)		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	100%	152.213.488	127.456.037	84%
7		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 100% - 100% - 100%	15.357.145.956	13.215.607.406	86,06%
21)		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	4.940.000	4.876.000	98,70%
22)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	69.040.000	54.190.700	78,49%
23)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%	15.283.165.956	13.156.540.706	86,09%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	62 Unit	62 Unit	100%	238.296.050	223.433.294	93,76%
24)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%	149.800.000	137.103.324	91,52%
25)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	100%	24.810.000	24.810.000	100,00%
26)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	100%	100%	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100%	63.686.050	61.519.970	96,60%
II		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	100%	100%	100%	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	187.430.523.807	184.673.841.446	98,53%
9		Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 100% - 100%	2.066.043.900	1.718.593.820	83,18%
27)		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	170.425.400	161.847.000	94,97%
28)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1.13.354.000	102.000.500	89,98%
29)		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	807.470.000	685.508.917	84,90%
30)		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	909.842.500	717.395.403	78,85%
31)		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	64.952.000	51.842.000	79,82%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10		Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	- Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu - Persentase penyerapan Dana Transfer - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu - Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 80 Poin	- 100% - 98,97% - 100% - 100% - 100% - 77,25 Poin	- 100% - 98,97% - 100% - 100% - 96,56%	651.756.800	635.262.016	96,00%
32)		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	23.000.000	23.000.000	100,00%
33)		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	64.452.000	58.055.460	90,08%
34)		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	306.258.800	303.102.904	98,97%
35)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100%	79.825.000	70.291.800	88,06%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
36)		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	163.161.000	155.093.052	95,67%
37)		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	155 Orang	155 Orang	100%	25.060.000	24.718.800	98,64%
11		Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	- 100% - 100% - 100%	1.512.953.000	1.277.837.319	84,46%
38)		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	180 Laporan	180 Laporan	100%	36.231.000	31.091.000	85,81%
39)		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	810 Dokumen	810 Dokumen	100%	123.838.000	83.637.500	67,54%
40)		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	24 Laporan	24 Laporan	100%	108.736.000	74.272.700	68,31%
41)		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BIUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	93 Laporan	93 Laporan	100%	386.029.000	289.343.856	74,95%
42)		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	553.960.000	509.917.303	92,05%
43)		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	40.201.000	37.698.125	93,77%
44)		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	171.478.000	164.636.835	96,01%
45)		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	27.808.000	23.301.000	83,79%
46)		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	157 Orang	157 Orang	100%	64.672.000	63.939.000	98,87%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12		Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	100 %	100%	183.091.245.107	180.974.134.196	98,84%
47)		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	1 Laporan	1 Laporan	100%	183.091.245.107	180.974.134.196	98,84%
13		Kegiatan: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	98.525.000	68.014.095	69,03%
48)		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	98.525.000	68.014.095	69,03%
III		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	100%	100%	100%	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	100 %	100%	1.505.031.700	1.409.488.780	93,65%
14		Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 100 % - 100 %	1.505.031.700	1.409.488.780	93,65%
49)		Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	100%	100%	100%	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	126.042.500	124.920.150	99,11%
50)		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	234.064.800	233.941.126	99,95%
51)		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	66.000.000	43.911.500	66,53%
52)		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	139.449.000	138.491.550	99,31%
53)		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	45 Laporan	45 Laporan	100%	156.752.000	156.156.950	99,62%
54)		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	148.537.400	142.606.700	96,01%
55)		Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	158.170.000	141.514.304	89,47%
56)		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	29.020.000	24.302.450	83,74%
57)		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	159.051.000	133.650.300	84,03%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Hasil)				Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)				Pagu		
			Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
58)		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45 Laporan	45 Laporan	100%	163.326.000	158.966.400	97,33%
59)		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	46 Laporan	46 Laporan	100%	48.265.000	48.265.000	100%
60)		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66 Orang	66 Orang	100%	76.354.000	62.762.350	81,20%
Total Pagu											209.708.940.884	203.680.981.081	97,13%

ANALISIS CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

1. Analisis Capaian Program

Pada Tahun Anggaran 2024, seluruh indikator kinerja Program dapat tercapai sesuai target, bahkan salah satunya dapat melampaui target. Capaian kinerja Program selengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator kinerjanya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD, target 83,50%, realisasi 84,60%, tingkat capaian kinerja 101,32%.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerjanya antara lain :
 - a. Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.
 - b. Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.
 - c. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, indikator kinerjanya adalah Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu, target 100%, realisasi 100%, tingkat capaian kinerja 100%.

2. Analisis Capaian Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2024, dari 14 Kegiatan yang dilaksanakan, hampir semua dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hanya ada 1 Kegiatan yang indikator kinerjanya belum semua mencapai target 100%, yaitu:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu, target 100% realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
 - b. Persentase penyerapan Dana Transfer, target 100% realisasi 98,97%, capaian kinerja 98,97%.

Penyerapan Dana Transfer tidak mencapai 100% karena jumlah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mencapai target. Target Pendapatan Transfer pada APBD merupakan proyeksi Pendapatan Daerah, sementara alokasi dan penyaluran Pendapatan Transfer termasuk DAK bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

- c. Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu, target 100% realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
- d. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), target 12 Laporan realisasi 12 Laporan, capaian kinerja 100%.
- e. Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu, target 100% realisasi 100%, capaian kinerja 100%.
- f. Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD, target 80 Poin realisasi 77,25 Poin, capaian kinerja 96,56%.

Pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah sudah cukup baik, di mana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 meraih Predikat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk keempatbelas kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung. Mengingat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berkali-kali meraih Predikat Opini WTP, di samping peraturan perundangan terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan yang sangat dinamis, maka perangkat daerah perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar dapat terus mempertahankan Predikat Opini WTP yang akan semakin sulit diraih, karena BPK dan auditor independen lainnya akan terus meningkatkan standar penilaiannya.

3. Analisis Capaian Sub Kegiatan

Hingga akhir Triwulan IV atau akhir Tahun Anggaran 2024, semua indikator kinerja Sub Kegiatan dapat tercapai sesuai target atau **tidak terdapat deviasi**.

DOKUMENTASI KEGIATAN BKAD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024



Rapat Evaluasi Kinerja dan Realisasi Anggaran



Rapat Rekonsiliasi JKN Semester II dengan BPJS



Rapat Koordinasi Pencairan Dana Alokasi Khusus



Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran TA. 2024



**Asistensi Akuntansi dan Pelaporan
dalam rangka Penyusunan LKPD**



Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan



Rekonsiliasi Penyusunan Laporan BMD



Pemasangan Label Gedung



Penghapusan BMD



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

1
Df.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yayon Hidayanto S.P., M.AccFin., Ak., CA, CSFA
Registri Negara Akuntan No. RNA-3701